

## Implementasi Pendidikan Inklusi Pada Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Firdaus Banjarmasin

**Barsihanor\* , Desy Anindia Rosyida**

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, Indonesia

\*email: barsihanor90@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.31603/tarbiyatuna.v10i2.2712>

---

### **ABSTRACT**

**Article Info:**

Submitted:

21/06/2019

Revised:

30/11/2019

Published:

31/12/2019

*This study aims to determine the implementation and inhibiting factors of the implementation of inclusive education in the Al-Firdaus Integrated Islamic Elementary School Banjarmasin. The research method used is a qualitative approach, and the type of research is case studies. The research informants were the school principal, inclusive school coordinator, class teacher, teacher assistant (special teacher), and students. The results of the study found the implementation of inclusive education in the Al-Firdaus Banjarmasin Integrated Islamic Elementary School including, 1). planning, each teacher is required to make lesson plans individually learning. 2). implementation, learning patterns carried out in the inclusive class consisted of three activities; tahfidz learning, regular classes, individual learning programs. 3). assessment, the school distinguishes the content of the questions and the difficulty level of the questions. Obstacles in the implementation of inclusive education at SDIT Al-Firdaus Banjarmasin occur in the implementation of learning in between classroom management and teachers need to repeatedly explain the material to students who are slow learners.*

**Keywords:** Implementation, Inclusive Education

---

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi dan faktor penghambat penyelenggaraan pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Firdaus Banjarmasin. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dan jenis penelitiannya yaitu studi kasus. Adapun informan penelitian yaitu kepala sekolah, koordinator sekolah inklusi, guru kelas, guru pendamping (guru khusus), dan siswa. Hasil penelitian menemukan implementasi pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Firdaus Banjarmasin di antaranya, 1). perencanaan, setiap guru diwajibkan membuat RPP program pembelajaran individual. 2). pelaksanaan, pola pembelajaran yang dilakukan pada kelas inklusi terdiri dari tiga kegiatan; pembelajaran tahfidz, kelas reguler, program pembelajaran individual. 3). penilaian, sekolah membedakan konten soal dan tingkat kesulitan soal. Hambatan dalam implementasi pendidikan

---

inklusi di SDIT Al-Firdaus Banjarmasin terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran di antaranya pengelolaan kelas dan guru perlu berulang kali menjelaskan materi pada siswa yang *slow learner*.

**Kata Kunci:** Implementasi, Pendidikan Inklusi

---

## PENDAHULUAN

Pendidikan dikatakan sebagai kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Peran pendidikan menjadi sangat penting bagi setiap orang untuk menjalani perubahan kehidupan kemajuan di zaman modern ini. Tanpa adanya pendidikan manusia akan kesulitan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang telah diharapkan dan diinginkan. Pendidikan juga berperan sebagai alat untuk mencerdaskan kehidupan manusia, setiap orang perlu belajar dan menuntut ilmu untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan baik, artinya dalam pelaksanaannya pendidikan dilaksanakan tidak memandang perbedaan agama, ras, suku, fisik maupun bahasa. Pemerataan pendidikan tersebut sangat jelas tertuang pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi “setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan”. UUD 1945 tersebut mengamatkan setiap manusia yang mempunyai identitas sebagai warganegara ini mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup.

Disamping itu, negara juga mengamatkan kepada semua warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat (1) menyebutkan “setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Dalam UU tersebut mengatur setiap warga negara di negeri ini berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tidak terkecuali anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus (ABK). Anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus kondisinya beragam, baik kondisi fisik, emosi, mental, dan sosial, maupun prilakunya. Keberagaman kondisi Anak Berkebutuhan Khusus ini membawa konsekuensi pada kurikulum, RPP, pembelajaran, penilaian maupun pada implementasinya. Kondisi keberagaman peserta didik ini, kadang menjadi hambatan bagi guru dalam merancang pembelajaran yang memperhatikan perbedaan karakteristik anak. (Murniarti & Anastasia, 2016). Implementasi tentang pendidikan dan layanan khusus diuraikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 tentang pemberian kesempatan atau peluang khusus kepada ABK agar dapat memperoleh pendidikan di sekolah reguler, mulai dari tingkat dasar hingga menengah. (Andriyani, 2017).

Pada kenyataan saat ini masih banyak anak berkebutuhan khusus belum mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang baik dan bermutu. Sejauh ini, banyak kalangan masyarakat yang masih belum menerima kehadiran anak yang memiliki kebutuhan khusus. Sebagian dari mereka masih memberikan perlakuan

yang diskriminatif kepada mereka, anak yang memiliki kebutuhan khusus cenderung dianggap sebagai anak yang memiliki kekurangan sehingga tidak layak untuk ikut belajar dengan anak yang normal, sehingga banyak sekolah-sekolah formal yang tidak menerima anak ABK ketika mereka mendaftar masuk sekolah di sekolah formal, mereka dianggap lebih cocok untuk dimasukkan di sekolah luar biasa (SLB).

Untuk menghilangkan adanya anggapan diskriminatif terhadap anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, pemerintah Indonesia sejak tahun 2000 memprogramkan pendidikan inklusif. Pada tahun 2002 penyelenggaraan pendidikan inklusif mulai dirintis di Indonesia, sampai sekarang 740 sekolah yang sudah berkembang, 29 sekolah di antaranya ada di Kalimantan Selatan. Jumlah tersebut terdiri dari 2 TK Inklusi, 17 SD Inklusi, 5 SMP Inklusi, 4 SMA Inklusi, dan 1 SMK Inklusi. Penyelenggaraan pendidikan inklusif di mulai dari pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK. (Utomo, 2013). Mengingat tentang pentingnya sekolah, menjadikan pendidikan inklusif tersebut tepat diberikan agar dapat memberikan pelayanan kepada semua ABK sehingga mendapatkan pendidikan yang layak, bermutu, dan berkelanjutan seperti halnya anak normal. (Andriyani, 2017). Perkembangan pendidikan inklusif, didorong dengan semakin banyaknya orangtua yang mempunyai anak yang mengalami kelainan dan anak cerdas dan/atau berbakat istimewa menuntut haknya untuk memperoleh akses pendidikan secara inklusif di satuan pendidikan reguler. (Utomo, 2013).

Pendidikan inklusif mengharapkan anak yang memiliki kebutuhan khusus dapat dididik bersama dengan anak normal lainnya. Bertujuan agar tidak ada lagi perbedaan antara ABK dengan anak normal, sehingga anak yang memiliki kebutuhan khusus dapat memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya. Mega Iswari dalam (Marti, 2012) menjelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus yaitu anak yang memiliki kelainan atau kekurangan dari segi fisiknya, mental, emosi dan sosial atau bisa jadi gabungan dari hal-hal tersebut, baik bersifat permanen ataupun temporer sehingga memerlukan layanan pendidikan khusus yang sesuai dengan kekurangan mereka. Pendidikan inklusi merupakan suatu layanan pendidikan bagi siswa yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus pada sekolah reguler (SD/MI, SMP/MTS, SMU, dan SMK/ sederajat) yang termasuk kelainan, lamban belajar maupun mengalami berkesulitan belajar lainnya. (Pramudiana, 2017). Pendidikan inklusi juga diartikan sebagai bentuk pendidikan yang menggabungkan anak ABK dengan anak normal pada umumnya agar belajar secara bersama-sama. Menurut Hildegun Olsen dalam (Pramudiana, 2017), pendidikan inklusi diartikan sebagai sekolah yang menampung semua anak dengan tidak membedakan kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau semacamnya.

Menurut Kustawan dalam (Kurniawati, 2017) sekolah inklusif membutuhkan instrument input yang memadai untuk menunjang keberhasilan suatu program inklusi. Diantaranya adalah peran profesional seorang guru pembimbing khusus. Guru

Pembimbing Khusus bertugas mendampingi program inklusi saat sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang telah mempunyai kompetensi dalam menghadapi siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Tugas guru pembimbing khusus pada sekolah inklusif tertuang pada Permendiknas No. 70. Tahun 2009, tugas dan tanggung jawab Guru Pembimbing Khusus (GPK) pada pembelajaran pendidikan inklusif yaitu: (1) merancang dan melaksanakan program khusus; (2) melakukan identifikasi, assesmen dan menyusun program pembelajaran individual (PPI); (3) memodifikasi materi ajar; (4) melakukan evaluasi pembelajaran bersama guru kelas; dan (5) membuat laporan program dan perkembangan ABK. (Kurniawati, 2017).

Peran GPK pada pembelajaran pendidikan inklusi sangat diperlukan terutama pada pembuatan program pembelajaran individual, meski pada pelaksanaan pembelajaran GPK tidak turut langsung menangani ABK. Rencana pembelajaran harusnya di susun setiap awal semester dimana dibentuk tim pengembang kurikulum dengan melibatkan GPK dan tim ahli lainnya saat menangani ABK dengan serius, sejauh ini penanganan ABK pada sekolah dasar negeri masih kurang maksimal. (Kurniawati, 2017). Hal tersebut sebagaimana yang telah peneliti temukan di beberapa sekolah dasar yang telah menyelenggarakan pendidikan inklusi di Kota Banjarmasin, ada beberapa SD Inklusi yang pada tahap pelaksanaan pendidikan inklusif belum terlaksana dengan baik, seperti pada aspek kebijakan sekolah, proses belajar mengajar, dan fasilitas sekolah. Sebagian sekolah inklusi memiliki visi dan misi sebagai sekolah inklusi, namun itu hanya sebatas pada visi dan misi saja, tidak sampai kepada tahap implementasi.

Proses belajar mengajar di sekolah inklusi juga terlihat belum ada perbedaan yang mencolok antara sekolah inklusi dan sekolah biasa, seperti pada kurikulum dan evaluasi yang digunakan sekolah inklusi. Dalam penyampaian materi di kelas tidak ada penyampaian khusus atau metode khusus yang digunakan dalam proses pembelajaran, padahal secara teoritis pembelajaran di sekolah reguler dengan sekolah yang menyelenggarakan program sekolah inklusi ada perbedaan, di antaranya harus adanya guru pendamping khusus, ada beberapa sekolah inklusi di Kota Banjarmasin belum memiliki GPK tersebut, sehingga yang mengajar di kelas merupakan guru biasa yang mayoritas dari mereka belum mempunyai keahlian dalam mengajar pada anak-anak berkebutuhan khusus. Keadaan seperti ini membuat ABK tidak mampu memahami dengan baik pelajaran yang mereka terima karena kemampuan mereka berbeda dengan anak yang normal.

Sebagaimana informasi yang peneliti dapatkan dari guru yang ada di salah satu sekolah inklusi, mereka mengungkapkan tidak ada GPK di sekolahnya sehingga peran GPK sekaligus diambil alih oleh guru kelas, oleh karena itu proses pembelajaran selama ini masih dilakukan secara tradisional, tidak ada perlakuan atau metode yang khusus digunakan di kelas, begitu pula pada aspek penilaian yang digunakan guru tidak

disesuaikan dengan kondisi anak berkebutuhan khusus, dilakukan sebagaimana sekolah biasa atau tidak ada anak ABK di kelas. Dari segi pelayanan dan fasilitas sekolah juga masih belum terlihat baik, hal tersebut terlihat ketika peneliti melakukan observasi langsung ke sekolah inklusi, salah satunya ketika masuk dan pulang dari sekolah, tidak ada pelayanan khusus atau fasilitas khusus yang disediakan sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus, di samping itu belum adanya juga fasilitas dan media yang dimiliki sekolah guna membantu anak berkebutuhan khusus saat mengikuti pembelajaran.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan jenis penelitian digunakan adalah studi kasus (*case studies*). Dalam proses pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek penelitian ini meliputi (1) Kepala sekolah sebagai pemegang kendali setiap kegiatan yang dilakukan di sekolah, (2) Ketua Tim inklusi, yang mengkoordinir jalannya pendidikan inklusi. (3) Guru kelas pada kelas inklusi, (4) GPK, guru yang mendampingi siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. (5) Siswa, sebagai objek.

Teknik analisis data dilakukan sebelum memasuki lapangan, saat di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Data yang sudah terkumpul dari berbagai macam teknik yang sudah dilaksanakan yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumen yang sudah dicatat oleh peneliti pada catatan lapangan. Semua data yang dianalisis sesuai dengan model interaksi melalui beberapa tahapan, seperti yang dikemukakan Miles & Huberman yaitu bahwa aktivitas dalam analisa, yaitu reduksi, *display*, dan *conclusion drawing/verification*. Agar didapat temuan dan interpretasi yang absah pada penelitian ini peneliti menggunakan dua triangulasi yaitu, triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Firdaus Banjarmasin.**

Pendidikan inklusi pada SDIT Al-Firdaus Banjarmasin berdasarkan pada SK penyelenggaraan sebagai sekolah inklusi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjarmasin. Sebagai sekolah inklusi, SDIT AL-Firdaus Banjarmasin belum memiliki kurikulum yang khusus terkait status inklusinya, untuk ABK masih mengikuti pelajaran sebagaimana anak yang normal di kelas hanya saja materi yang diberikan untuk anak ABK diturunkan dari pada anak normal. Hal yang terpenting dalam implementasi Pendidikan inklusi menurut Ainscow dalam (Sunanto & Hidayat, 2016) Sekolah inklusi harus memperlihatkan terjadinya, 1). Hadir Bersama, 2). Partisipasi, 3). Pencapaian atau prestasi pada suatu proses pembelajaran.

Dalam proses penyelenggaraan program inklusi, sekolah membentuk Koordinator Inklusi yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan program inklusi. Tim Guru ABK yang menangani penyelenggaraan pendidikan inklusi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Pendidikan inklusi. Disamping itu sekolah juga membuat program kerja sebagai bagian dari perencanaan, program kerja yang dibuat dalam jangka satu tahun seperti pertemuan rutin sekolah, GPK dengan orangtua, penilaian, layanan dan fasilitas. SDIT Al-Firdaus Banjarmasin memiliki 9 Guru pendamping khusus, 7 orang di antaranya lulusan PLB dan PGMI berjumlah 2 orang. Walau ada GPK yang bukan dari lulusan PLB, sekolah mengirim guru GPK tersebut untuk mengikuti pelatihan tentang Pendidikan inklusi yang diselenggarakan dari pihak luar sekolah.

Proses belajar mengajar di kelas inklusi berbeda dengan kelas yang regular, termasuk dalam perencanaan pembelajaran. Setiap guru diwajibkan memiliki RPP sebelum mengajar, RPP yang digunakan di kelas inklusi mengalami modifikasi dengan menyesuaikan anak ABK nya. Kelas inklusi juga memiliki Program Pembelajaran Individual (PPI). Rona Fitria menjelaskan untuk membantu kelancaran pembelajaran maka semua guru wajib membuat rancangan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dan PPI (Fitria, 2012). PPI di buat oleh GPK (Guru Pendamping Khusus). PPI merupakan program khusus yang dimiliki sekolah untuk ABK, berupa jam tambahan pelajaran di luar kelas, dan prosesnya dilakukan dengan disediakan tempat khusus. Senada dengan hal tersebut Lilik Maftuhatin Mengungkapkan GPK memiliki tanggung jawab pada pembuatan program, monitor pelaksanaan program dan mengevaluasi hasil pelaksanaan program, pemberian layanan individual sesuai pada tingkat kebutuhan anak, kemampuan memodifikasi pembelajaran agar ABK dapat belajar Bersama dengan anak yang normal dengan bimbingan guru kelas, bidang studi atau guru lainnya. Guru pendamping khusus memiliki peran dalam membimbing beberapa aktivitas tertentu yang tidak bisa diikuti oleh ABK dengan menggunakan program pembelajaran individual (PPI) (Maftuhatin, 2014).

Perencanaan yang dilakukan oleh kelas inklusi berbeda dengan kelas yang tidak ada anak ABK nya, ada modifikasi atau penambahan yang dilakukan pada RPP di kelas Inklusi atau kelas yang terdapat anak ABK nya. RPP di buat untuk acuan saat melaksanakan proses pembelajaran didalam kelas. Pelaksanaan pembelajaran di kelas inklusif pada dasarnya sama dengan pelaksanaan pembelajaran di kelas reguler. Pola pembelajaran yang dilakukan pada kelas inklusi terdiri dari tiga kegiatan. pertama, dalam pembelajaran tahfidz anak ABK langsung di bawah bimbingan pendampingnya dalam waktu satu jam. Kedua, dalam hal belajar saat didalam kelas, anak ABK Bersama-sama anak yang lainnya, Ketiga, ABK dikumpulkan pada satu ruangan dan dibimbing oleh guru pendamping khusus yang kompeten tuk

memberikan pembelajaran khusus kepada anak ABK. ABK dalam proses pembelajarannya didampingi oleh satu Guru Pendamping Khusus (GPK). Mengenai strategi dan metode yang digunakan, guru belum mempunyai strategi dan metode khusus bagi pembelajaran di kelas, mengajar di kelas inklusi hanya berlandaskan niat yang tulus, keikhlasan dan kesabaran dalam memberikan pembelajaran kepada ABK.

Menurut Juang Sunanto dan Hidayat desain pembelajaran inklusi seharusnya bersifat inklusif, yaitu suatu upaya mengakomodasi semua keperluan dan hambatan pada belajar siswa yang beragam. Pada pendidikan inklusi ada beberapa konsep yang harus dikembangkan, yaitu tentang konsep anak, konsep sistem pendidikan suatu sekolah, konsep keberagaman dan diskriminasi, dan konsep sumber daya (Sunanto & Hidayat, 2016). Desain pembelajaran dibuat yang diperlukan secara bersama untuk siswa ABK dan siswa normal lainnya disebut dengan desain pembelajaran inklusif. Komponen utama dari desain ini yaitu terdiri dari metode, materi, media, dan evaluasi. Pada semua komponen ini harus dilakukan modifikasi untuk bisa mengakomodasi semua keragaman siswa (Sunanto & Hidayat, 2016).

Pada tahapan penilaian, yang dilakukan di kelas inklusi, tentu berbeda dengan kelas biasa yang tidak terdapat ABK nya, sekolah penyelenggara pendidikan inklusif memiliki format penilaian khusus yang mempertimbangkan jenis dan tingkatan ABK nya. Hal itu sejalan dengan Orin Oktorina, menurut dia sekolah inklusif pada dasarnya harus melaksanakan asesmen, pelaksanaan pembelajaran sampai pada penilaian hasil belajar anak berkebutuhan khusus. Semuanya itu perlu disesuaikan dengan kebutuhan anak (Oktorima, 2015). Dalam hal penilaian, khususnya KKM tidak terdapat perbedaan anak ABK dan yang normal, sekolah hanya membedakan cara yang digunakan untuk mengevaluasinya seperti membedakan konten soal dan tingkat kesulitan soal. Dalam hal pendokumentasian hasil belajar siswa, seperti raport, sekolah juga tidak membedakan antara anak yang normal dengan ABK, hal itu dimaksudkan agar tidak ada kesan deskriminasi.

Hal itu sejalan dengan tujuan dari Sekolah inklusi yakni sebagai bentuk pemerataan dan perwujudan pendidikan tanpa didasari diskriminasi, dimana semua anak berkebutuhan khusus dan anak normal pada umumnya bisa mendapatkan pendidikan yang sama. Pendidikan inklusi juga menyediakan layanan pendidikan khusus yang mensyaratkan kepada semua ABK agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak di kelas reguler bersama anak normal seusianya (Permata Darma & Rusyidi, 2018). Skortjen lebih jauh menjelaskan pendidikan inklusif sebagai bentuk reformasi pendidikan yang bororientasi pada anti diskriminasi, persamaan hak dan kesempatan, keadilan, akses pendidikan untuk semua, peningkatan terhadap kualitas pendidikan, upaya strategis dalam menuntaskan hak wajib belajar sembilan tahun, dan upaya mengubah mindset masyarakat tentang anak yang memiliki kebutuhan khusus (MD , 2001).

## 2. Kendala dalam implementasi pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Firdaus Banjarmasin

Pelaksanaan pendidikan inklusi untuk anak yang memiliki kebutuhan khusus masih mendapati banyak kendala terlebih dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Banyak hambatan yang masih terjadi pada pelaksanaan pembelajaran diantaranya pada saat guru menjelaskan tidak hanya sekali atau dua kali, namun harus beberapa kali menjelaskan materi ajar, terutama bagi siswa yang *slow learner*. Guru mengalami kesulitan dalam membuat siswa fokus saat pembelajaran. Menurut Dayinta Galih Jalanidhi Penilaian yang dilakukan kepada siswa *slow learner* yaitu dengan menggabungkan dua nilai dari soal yang berbeda lalu dirata-rata. Semua nilai tersebut adalah nilai yang diberi guru kelas dan nilai yang diberi dari GPK. Tapi jika GPK dapat mendampingi saat penilaian dilakukan, maka penilaian cukup berasal dari pemberian guru kelas saja (Jalanidhi, 2017).

Bercampurnya siswa yang normal dan yang ABK juga membuat guru kesulitan dalam mengelola kelas. Siswa sangat sulit dikondisikan agar tetap tenang saat ditempat duduk. Kelas yang ramai, teman-temannya yang nakal, materi pelajarannya kurang jelas. Menurut Budianto ada lima profil pembelajaran untuk sekolah inklusi, yaitu:

- a. Pendidikan inklusi menciptakan suasana kelas yang kondusif, dapat menerima keanekaragaman dan dapat menghargai perbedaan antara sesama.
- b. Pendidikan inklusi menerapkan kurikulum yang multilevel dan multi modalitas.
- c. Pendidikan inklusi juga menyiapkan dan mendorong guru agar mengajar secara komunikatif dan interaktif.
- d. Pendidikan inklusi mendorong guru dan kelas secara terus menerus dan penghapusan hambatan yang berkaitan dengan isolasi profesi.
- e. Pendidikan inklusi juga melibatkan orangtua dalam perencanaan sekolah (Fitria, 2012).

## KESIMPULAN

Dari hasil temuan peneliti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya tentang implementasi pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Firdaus Banjarmasin maka bisa diambil kesimpulan sebagai berikut:

### 1. Implementasi pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Firdaus Banjarmasin.

#### a. Perencanaan

Setiap guru diwajibkan membuat RPP, RPP yang digunakan di kelas inklusi mengalami modifikasi dengan menyesuaikan anak ABK nya. Kelas inklusi juga memiliki Program Pembelajaran Individual (PPI). PPI di buat oleh GPK (Guru Pendamping Khusus). PPI merupakan program khusus yang dimiliki

sekolah untuk ABK, berupa jam tambahan pelajaran di luar kelas, dan prosesnya dilakukan dengan disediakannya tempat khusus.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembelajaran pada kelas inklusif ini umumnya sama dengan pelaksanaan pembelajaran pada kelas reguler. Pola pembelajaran yang dilakukan pada kelas inklusi terdiri dari tiga kegiatan. pertama, dalam pembelajaran tahfidz anak ABK langsung di bawah bimbingan pendampingnya dalam waktu satu jam. Kedua, dalam hal belajar di kelas, siswa ABK Bersama-sama siswa yang lain, Ketiga, ABK dikumpulkan dalam satu ruangan dan dibimbing oleh guru pendamping khusus yang kompeten tuk memberikan pembelajaran khusus kepada anak ABK. ABK dalam proses pembelajarannya didampingi oleh satu Guru Pendamping Khusus.

c. Penilaian

Penilaian, yang dilakukan di kelas inklusi berbeda dengan kelas biasa yang tidak terdapat ABK nya, terutama dalam hal penilaian, khususnya KKM tidak terdapat perbedaan anak ABK dan yang normal, sekolah hanya membedakan cara yang digunakan untuk mengevaluasinya seperti membedakan konten soal dan tingkat kesulitan soal. Dalam hal pendokumentasian hasil belajar siswa, seperti Raport, sekolah juga tidak membedakan antara anak yang normal dengan ABK, hal itu dimaksudkan agar tidak ada kesan deskriminasi.

## **2. Kendala dalam implementasi pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Firdaus Banjarmasin**

Pelaksanaan pendidikan inklusi bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus ini masih menemui banyak kendala terlebih dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Banyak hambatan yang sering terjadi pada pelaksanaan pembelajaran diantaranya saat guru menjelaskan perlu berulang kali menjelaskan materi, terlebih bagi siswa yang *slow learner*. Disamping itu guru juga mengalami masalah dalam hal pengelolaan kelas, yaitu saat siswa sulit sekali dikondisikan agar tetap tenang ditempat duduk.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andriyani, W. (2017). *Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Taman Muda Ibu Pawiyatan Yogyakarta*. Yogyakarta: Skripsi: Tidak diterbitkan, UNY.
- Fitria, R. (2012). Proses Pembelajaran Ddalam Setting Inklusi di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus*, Volume 1 Nomor 1.
- Jalanidhi, D. G. (2017). Identifikasi Hambatan-Hambatan Guru dalam Pembelajaran di Sekolah Inklusif SD Negeri 2 Petir Piyungan, Bantul. *Jurnal Widia Ortodidaktika*, Vol 6 No 8.

- 
- Kurniawati, L. (2017). Pembelajaran Pendidikan Inklusi Pada Sekolah Dasar. *Edutech*, 159-160.
- Maftuhatin , L. (2014). Evaluasi Pembelajaran Anak Berkebutuhan. *Religi: Jurnal Studi Islam*, Volume 5, Nomor 2.
- Marti, A. D. (2012). Pendidikan Inklusif di sekolah Dasar Kota Padang. *E-JUPEkhu*, 2.
- MD , S. (2001). *Skjorten, MD Towards Inclusion, Education-Special Needs Education An Introduction*. Oslo: Unipub forlag.
- Murniarti, E., & Anastasia, N. Z. (2016). Pendidikan Inklusif di Tingkat Sekolah Dasar: Konsep, Implementasi, dan Strategi. *J D P*, 11.
- Oktorima, O. (2015). Penilaian Hasil Belajar Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus*, Volume 4 Nomor 3.
- Permata Darma, I., & Rusyidi, B. (2018). Pelaksanaan Sekolah Inklusi di Indonesia. *Jurnal Penelitian*, Vol. 2, No. 2.
- Sunanto, J., & Hidayat. (2016). Desain Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam Kelas Inklusif. *Jurnal Penelitian*, Vol. 17, No. 1.
- Utomo. (2013). Meluruskan Implementasi Pendidikan Inklusif. *Prosiding*, 2.